

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN BUMDES DI DESA SUMBERSUKO, KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG

Sinollah¹, Doni Teguh Wibowo², Achmad Zaki³, Yusuf Iskandar⁴

^{1,2}Universitas Islam Raden Rahmat, Malang

³Universitas Nahdlatul Ulama, Sidoarjo

⁴STIE Jayanegara Tamansiswa, Malang

¹sinollah@gmail.com

Abstract

The purpose of this activity is to provide assistance to the strengthening of BUMDes by involving the participation of managers, BPD and the community and in Sumberuko Village. The method used is cross-program cooperation with managers, cross-sector collaboration with village officials and communities with a socio-caricative approach and a transformative approach. Strengthening the BUMDes Suko Jaya was carried out by conducting FGDs with village administrators, village officials and business managers in Sumberuko Village. The next step is to hold a strengthening workshop both in terms of organization and financial governance. The results of this activity are: 1). Management's understanding of the functions and duties of BUMDes is getting stronger so that the need for Village Regulations and AD ART is important. As a result, the Perdes and Bumdes AD ART have been drafted and approved by the Village Head. 2). As an initial form, BUMDes "Suko Jaya" manages two water sources and one Sharia cooperative.

Keywords: BUMDes; Assistance; Strengthening; Welfare

Abstrak

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan terhadap penguatan BUMDes dengan melibatkan peran serta pengelola, BPD dan masyarakat dan di Desa Sumberuko. Metode yang digunakan adalah kerjasama lintas program dengan pengelola, kerjasama lintas sektor dengan aparat desa dan masyarakat dengan pendekatan sosio karikatif dan pendekatan transformatif. Penguatan BUMDes Suko Jaya dilakukan dengan melaksanakan FGD dengan pengurus, perangkat desa dan pengelola usaha di Desa Sumberuko. Langkah selanjutnya adalah mengadakan workshop penguatan baik dari segi keorganisasian maupun dari tata kelola keuangannya. Hasil dari kegiatan ini adalah: 1). Pemahaman pengurus terhadap fungsi dan tugas BUMDes semakin kuat sehingga kebutuhan akan Peraturan Desa dan AD ART menjadi penting. Hasilnya Perdes dan AD ART Bumdes sudah dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa. 2). Sebagai bentuk awal, BUMDes "Suko Jaya" mengelola dua sumber air dan satu koperasi Syariah.

Kata Kunci: BUMDes; Pendampingan; Penguatan; Kesejahteraan

Submitted: 2022-07-17

Revised: 2022-07-20

Accepted: 2022-07-28

Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang akan disejahterakan. Pembangunan yang terus dilakukan di pedesaan dimulai sejak era orde baru, era reformasi, sampai saat ini yang telah menunjukkan banyak kemajuan dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, maupun ekonomi. (Hidayat, 2016). Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Salah satu upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian desa adalah dengan mendirikan BUMDes.

BUMDes adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan ekonomi desa. BUMDes diharapkan menjadi pionir dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Dalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga disinggung bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dari dana desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pengembangan BUMDes merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan

berbagai jenis potensi yang ada di desa. (Marala, et al, 2018).

Gagasan pemerintah dalam pembentukan BUMDes adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Serta mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Usaha Milik Desa. Kemudian pada tahun 2015 diperbarui dengan Permendesa PDDT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur bagaimana pendirian, kepengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Nugraha dan Kismartini, 2019). Memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Apakah itu berarti kekuatan BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia? Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas peluang usaha rumahan yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa (anonymous, 2018).

Perkembangan BUMDes harus mendapat perhatian khusus dari aparat pemerintah, terutama pemerintah desa. Agar program BUMDes dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Desa Sumpoko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang telah memiliki lembaga BUMDes. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian desa, di Desa Sumpoko juga telah berdiri lembaga BUMDes yang diberi nama "BUMDes Sumpoko". Permasalahan umum yang terjadi pada lembaga BUMDes selalu berasal dari faktor manajemen dan kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut juga terjadi pada lembaga BUMDes di Desa Sumpoko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang sudah terbentuk pada tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Mahmudi. BUMDes di Desa Sumpoko memiliki nama kelembagaan "BUMDes Sumpoko". Selama satu tahun terbentuk BUMDes Sumpoko masih belum memiliki sistem manajemen yang baik, bahkan masih belum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan keberadaan lembaga BUMDes. Sekedar dibentuk tidak ada kegiatan sama sekali, hanya memenuhi tuntutan undang-undang.

Hal tersebut membuat dosen Program Studi Manajemen UNIRA Malang yang terdiri dari Sinollah, Doni Teguh Wibowo dan Adita Nafisa terdorong untuk membantu pengurus BUMDes dalam menata manajemen didalamnya. Dibantu oleh mahasiswa Manajemen UNIRA Malang sebagai fasilitator untuk melakukan pendampingan terhadap BUMDes Sumpoko agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengurus legalitas BUMDes Sumpoko kepada notaris. Pendampingan BUMDes menjadi program utama Dosen Manajemen UNIRA Malang, mengingat BUMDes merupakan pilar yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Desa Sumpoko merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang telah memiliki lembaga BUMDes. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian desa, di Desa Sumpoko juga telah berdiri lembaga BUMDes yang diberi nama "BUMDes Sumpoko". Permasalahan umum yang terjadi pada lembaga BUMDes selalu berasal dari faktor manajemen dan kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut juga terjadi pada lembaga BUMDes di Desa Sumpoko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang sudah terbentuk pada tahun 2018 yang diketuai oleh Bapak Mahmudi. BUMDes di Desa Sumpoko memiliki nama kelembagaan "BUMDes Sumpoko". Selama satu tahun terbentuk BUMDes Sumpoko masih belum memiliki sistem manajemen yang baik, bahkan masih belum mengetahui apa yang harus dilakukan dengan keberadaan lembaga BUMDes.

Hal tersebut membuat Dosen Manajemen UNIRA Malang terdorong untuk membantu pengurus BUMDes dalam menata manajemen didalamnya, kami juga melakukan pendampingan terhadap BUMDes Suko Jaya agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan mengurus legalitas BUMDes Suko Jaya kepada notaris. Pendampingan BUMDes menjadi program utama Dosen Manajemen UNIRA Malang, mengingat BUMDes merupakan pilar yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Metode

Pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini mengacu kepada pendapat Syamsul dalam Heny, *et.al* (2018), khususnya : 1) Pendekatan Sosio Karikatif, merupakan bentuk pendekatan yang didasari oleh sebuah anggapan bahwa klien (pengelola) adalah komunitas tidak berdaya, menderita, miskin yang tidak mampu memecahkan permasalahan sendiri. Oleh karenanya pengelola ditempatkan sebagai tempat yang akan dibantu, ditolong dan diberikan sumbangan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (karikatif philanthropi) dan nilai-nilai keIslaman. 2). Pendekatan Transformatif, merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan dengan perubahan pandangan, pemikiran, sikap dan tingkah laku bersama menuju kemandirian personal. Nilai yang dikembangkan dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia pada hakekatnya memiliki kemerdekaan dalam memilih jalan hidup dan menentukan masa depannya. Selain itu manusia memiliki harga diri dan potensi yang dapat dikembangkan, sehingga dapat menjadi faktor mendasar untuk merubah nasibnya. Performa kegiatan pendekatan ini pada umumnya diarahkan pada upaya-upaya pengembangan kesadaran kritis yang dapat menstimulir terjadinya transformasi nilai kehidupan

Pendampingan dan penguatan BUMDes dimulai pada tanggal 6 Agustus 2021, yang diawali dengan silaturahmi kepada ketua BUMDes dan membicarakan perihal fungsi dan kegunaan BUMDes untuk Desa Sumpersuko serta membahas tentang strategi bagaimana cara mengembangkan BUMDes Suko Jaya agar dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Desa Sumpersuko juga kepada masyarakat, kegiatan tidak hanya kepada ketua BUMDes, dosen dan mahasiswa juga memberikan bimbingan dan penjelasan mengenai BUMDes, dan para pengurus BUMDes lainnya, Kepala Desa, dan kepada perangkat Desa Sumpersuko. Keputusan tersebut diambil tim berbekal pelaksanaan pengabdian sebelumnya dari salah satu penulis (Sinollah, 2019), bahwa meskipun sasaran utamanya adalah pengurus BUMDes, namun pihak-pihak yang berkaitan harus juga diikuti untuk efektifitas pelaksanaan program. Dari hasil silaturahmi ini didapat data bahwa secara organisasi, BUMDes Sumpersuko sudah terbentuk dengan SK Kepala Desa. Namun selama setahun berdiri belum sama sekali mempunyai kelengkapan seperti: kantor, AD ART, Jenis usaha, modal kerja dan Peraturan Desa yang menaunginya. Dengan pelaksanaan pengabdian ini diharapkan kelengkapan tersebut sudah ada atau sudah disediakan oleh pihak desa.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap BUMDes Suko Jaya. Dimulai dengan silaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa, juga kepada pengurus BUMDes Suko Jaya disertai dengan penyampaian program kerja pengabdian dosen dan mahasiswa UNIRA Malang. Tahap perkenalan ini semua peserta pengabdian melakukan silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, perangkat desa, kepala desa, dan kepada pengurus BUMDes. Tahap perkenalan ini dilakukan secara informal kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan BUMDes agar tercipta keharmonisan dan pemahaman antara peserta pengabdian dan seluruh masyarakat di Dusun Craba'an.

Sosialisasi mengenai program yang akan dilaksanakan oleh peserta pengabdian, yakni pendampingan dan penguatan BUMDes Suko Jaya Desa Sumpersuko. Pada tahap ini peserta

pengabdian menyampaikan tentang ide, konsep, dan gagasan mengenai pendampingan dan penguatan BUMDes Suko Jaya Desa Sumbersuko. Sosialisasi ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana dukungan dari masyarakat dan juga untuk meminta restu dari masyarakat serta menyamakan visi misi agar BUMDes Suko Jaya Desa Sumbersuko dapat terus beroperasi ke depannya.

Sosialisasi ini dilakukan selama beberapa hari yang dimulai pada tanggal 6 Agustus 2021, mengingat banyak pihak yang dikunjungi dan itu bukan hanya pihak dari Dusun Craba'an saja melainkan pihak-pihak terkait dengan BUMDes terutama yang kediamannya terletak di Dusun yang lain di Desa Sumbersuko. Peserta pengabdian juga sangat bersyukur karena semua pihak yang terkait dengan BUMDes, juga Kepala Desa sangat mendukung program yang akan dilaksanakan dengan harapan akan membawa dampak positif bagi Desa Sumbersuko dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumbersuko.



Gambar 1. FGD dan Sosialisasi dengan Pengurus BUMDes dan tokoh masyarakat

Berbekal restu dari tokoh masyarakat dan respon positif dari masyarakat, tahap selanjutnya adalah pendampingan dan penguatan BUMDes Sumbersuko dimulai pada tanggal 12 Agustus 2021. Hal pertama yang dilakukan dalam pendampingan BUMDes ini, peserta pengabdian UNIRA Malang adalah melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan pengurus BUMDes, Perangkat Desa, Pengelola usaha desa. Dalam FGD tersebut memberikan penjelasan tentang fungsi dan tugas BUMDes serta bagaimana cara agar BUMDes dapat beroperasi dan memberikan bimbingan tentang penyusunan laporan keuangan sebagai laporan yang dibutuhkan oleh semua badan usaha.

Penguatan pertama yang dilakukan adalah pembentukan Perdes tentang BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 15 Agustus 2021 dengan melibatkan pengurus BUMDes, tokoh masyarakat dan perangkat desa bertempat di balai Desa Sukorejo.



Gambar 2. Rapat Pleno Perdes tentang BUMDes BUMDes

Tanggal 20 Agustus 2021 dilaksanakan rapat pleno Perdes tentang BUMDes bertempat di balai Desa Sukorejo.

Tanggal 24 Agustus 2021, peserta pengabdian memberikan pelatihan kepada perangkat desa, pengurus BUMDes, dan beberapa lembaga unit usaha yang ada di Desa Sumbersuko yang akan berada di bawah naungan BUMDes Suko Jaya. Pelatihan ini diberikan materi penguatan kelembagaan dan penguatan pengelolaan keuangan BUMDes.



Gambar 3. Pelatihan penguatan kelembagaan dan penguatan pengelolaan



Gambar 4. Peserta Pelatihan penguatan kelembagaan dan penguatan pengelolaan keuangan BUMDes

Evaluasi terhadap keberhasilan pengabdian ini adalah mulai beroperasi BUMDes dan menyusun beberapa hal yang belum terorganisasi dengan benar, seperti tersusunnya Perdes, membuat AD ART dan mulai membuat rancangan laporan keuangan. Juga memasukkan unit usaha apa saja yang akan berada di bawah naungan BUMDes Suko Jaya..

Hasil dan Pembahasan

Program pendampingan dan penguatan BUMDes ini dimulai dari nol, sebab walaupun BUMDes Suko Jaya telah di bentuk pada tahun 2018, sampai saat ini belum ada program kerja yang telah dilakukan oleh pihak BUMDes dikarenakan pengurus BUMDes masih merasa kebingungan tentang fungsi dan tugas BUMDes, serta apa saja yang sebenarnya harus dilakukan oleh BUMDes untuk desa. Berdasarkan hasil penelusuran dan hasil wawancara menunjukkan bahwa:

Table 1. keberadaan dokumen BUMDes

No	Kelengkapan BUMDes	Keberadaan Dokumen	
		Ada	Tidak ada
1	Perdes tentang BUMDes		√
2	AD ART BUMDes		√
3	Jenis Usaha		√
4	Modal		√
5	Kepengerusan BUMDes (SK Kades)	√	
6	Kantor BUMDes		√

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari 6 kelengkapan BUMDes, 5 diantaranya tidak dimiliki oleh BUMDes Suko Jaya Desa Sumbersuko. Ketidaklengkapan tersebut dikarenakan BUMDes dibentuk hanya untuk memenuhi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Satu-satunya kelengkapan (legalitas) yang dimiliki BUMDes Suko Jaya hanya SK Kepala Desa tentang pengangkatan Pengurus BUMDes. Sementara pengurus yang diangkat tidak memiliki kecakapan dalam mengelola BUMDes. Kondisi tersebut diperparah tidak adanya pelatihan terkait BUMDes dan pengelolannya. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan (13/12/2019), mengatakan "BUMDes ini sekadar dibentuk, setelah itu tidak dikelola dengan baik". Hasil penelitian Ibrahim dkk (2019) menunjukkan bahwa factor keterbatasan anggaran dan minimnya kualitas sumberdaya manusia menjadi kendala dalam

pengelolaan BUMDes di Sumatera Barat. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah: "Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Sementara kendala lainnya menurut penelitian Hidayat (2016) karena factor manajemen, sehingga diusulkan untuk menerapkan New Public Management (Hood, 1991) dan Fadel Model (2008), dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di BUMDES serta mampu memperkuat keberlanjutan kehidupan organisasi dan membangun kewirausahaan.

Saat ini pengurus BUMDes Suko Jaya sudah di legalisasi dengan SK Kepala Desa dan Peraturan Desa Sumpersuko Nomor : 017/PerDes-02/X/2020 dan sudah memiliki AD ART yang didampingi oleh peserta pengabdian UNIRA Malang. Berdasarkan legalisasi tersebut, unit usaha yang mulai dialihkan untuk berada dibawah naungan BUMDes Suko Jaya adalah Usaha Wislich Tenaga Air dan Koperasi Syari'ah sumpersuko. Bahkan BUMDes Suko Jaya telah memiliki perencanaan 1 tahun ke depan untuk bekerjasama dengan pihak TELKOM dan BNI. Peserta pengabdian UNIRA Malang 2019 juga membuat aplikasi yang bermanfaat untuk pengelolaan administrasi BUMDes agar lebih mudah dalam menata manajemen dan administrasi BUMDes Suko Jaya.

Segala yang dilakukan oleh peserta pengabdian UNIRA Malang 2021 untuk Desa Sumpersuko merupakan sebuah bentuk pengabdian yang diharapkan membawa manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Desa Sumpersuko. Pendampingan oleh peserta pengabdian UNIRA Malang 2021 akan terus dilakukan sampai BUMDes Suko Jaya Desa Sumpersuko dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Desa Sumpersuko. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesadaran kepada pengurus BUMDes Suko Jaya Desa Sumpersuko untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai salah satu komponen yang ada dalam Pemerintah Desa Sumpersuko, dimana dalam merencanakan programnya harus berbasis kepada bukti untuk menjamin efektifitas program desa. Maka dari itu, pemotivasian perlu dilakukan untuk menambah pemahaman pengurus BUMDes dan pemerintah desa, seperti halnya yang dilakukan Firdausi dan Adriansyah (2018) bahwa dengan pemberian motivasi ini juga dapat meningkatkan pemahaman perangkat Desa Murtajih dalam merencanakan program berbasis bukti.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa kehadiran peserta pengabdian yang berasal perguruan tinggi mendapatkan respon positif dari pihak desa, baik perangkat maupun warga desa. Mereka beranggapan dengan kehadiran perguruan tinggi di desanya, ada banyak harapan yang digantungkan untuk itu. Tidak hanya soal bagaimana BUMDes bisa berjalan, tetapi juga beberapa persoalan sosial yang selama ini buntu juga dapat diurai sedikit demi sedikit. Tentunya hal tersebut bukan merupakan akhir dari kegiatan pengabdian itu sendiri, namun bagi para peserta merupakan awal untuk dapat memberikan sumbangsih khususnya pemikiran untuk pengembangan desa. Salah satu harapan yang ditunggu oleh pengurus BUMDes Suko Jaya, khususnya oleh yang mengurus Usaha Wislich Tenaga Air adalah dipergunakannya sebuah aplikasi yang dapat menghitung secara otomatis pemakaian debit air pada setiap rumah tangga sehingga pelayanan pembayaran dapat dilaksanakan tepat waktu dan lebih efisien. Upaya awal yang dilakukan oleh peserta pengabdian adalah mengadopsi teknologi informasi untuk melakukan pencatatan pemakaian debit air secara otomatis, namun kegiatan ini belum sepenuhnya selesai. Kami merekomendasikan kepada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Saintek Unira Malang untuk dapat melanjutkan upaya tersebut agar lebih tepat guna dan berdaya guna. Misalnya dengan pembuatan aplikasi catat meter air dengan android (Sriwahyuningsih dan Putra, 2018; Ashari, 2010). Selain itu, pihak Desa Sumpersuko dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan program CSR dari PDAM Kabupaten Malang atau dari pihak lain yang berkompeten. Dengan CSR diharapkan terdapat dampak positif tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial seperti hasil penelitian Novia et.al (2021). Pendekatan *community development* agar dapat mengelola BUMDes dengan

efektif dan efisien juga dapat dilakukan, dengan harapan dapat mengubah pengetahuan, keterampilan, keterampilan, komunikasi dan perilaku mitra dalam mengelola BUMDes secara efektif dan efisien, hal mengingat hasil penelitian Nurhayati (2021) bahwa dengan pendekatan *community development* dapat mengefektif dan mengesfisienkan kewirausahaan mitra di Desa Murung Raya.

Kesimpulan

Pendampingan penguatan BUMDES Desa Sumpersuko, Kecamatan Dampit berjalan dengan lancar. Hal ini, dikarenakan mendapat dukungan penuh dan respon positif dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat Desa, dan terutama dukungan penuh dari Kepala Desa sehingga seluruh program yang dijalankan dapat terlaksana baik program utama maupun program tambahan lainnya. Luaran yang diperoleh adalah Perdes Tentang BUMDes, AD ART dan Program Kerja BUMDes Suko Jaya.

UNIRA Malang sebagai pihak kampus yang menggagas konsep ini melalui Dosen Program Studi Manajemen diharapkan terus aktif melakukan pendampingan. Desa Sumpersuko juga dijadikan desa binaan oleh Unira Malang melalui Nota Kesepahaman atau MoU yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2021. Kepada pihak Desa Sumpersuko untuk terus memotivasi pengurus BUMDes dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan sarana pendukung. Selain itu, Kepala Desa Sumpersuko diharapkan terus memberikan dukungan kepada pengurus BUMDes Suko Jaya dengan memberikan fasilitas pendukung seperti kantor, komputer dan kendaraan sebagai sarana pelaksanaan tugas.

Daftar Pustaka

- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019) "Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang", *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), pp. 43-56. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223>
- Anonymous. (2018) "Informasi Lengkap Tentang Bumdes Yang Harus Anda Ketahui". <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>. Diakses 04 Juli 2019.
- Ashari, M Ibrahim. (2010) "Penghitung Otomatis Pembacaan Meteran Air Minum Jarak Jauh Pada Pt. Citra Gading Astritama Di Perumahan Tirtasani Estate Berbasis Mikrokontroler At89s51". *TEKNO*, 14(2). pp. 21-32
- Muhammad, Fadel. (2008) "Reinventing local government: pengalaman dari daerah". Jakarta: Elex Media Komputindo
- Firdausi, N. J. and Adriansyah, A. A. (2018) "Pengenalan Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti Di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Community Development Journal*, 2(1). pp. 82 - 89, doi: 10.33086/cdj.v2i1.387
- Hadiyat, Y. (2016) "Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus Bumdes Mugirahayu, Desa Lebak Herang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)", *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 9(1), pp. 71-84. doi:<http://dx.doi.org/10.32832/jm-uika.v9i1.1335>
- Hood, Christopher (1991). "A Public Management for All Seasons?". *Public Administration*. 69 (1): 3–19. doi:10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
- Ibrahim, I., Sutarna, I., Abdullah, I., Kamaluddin, K., & Mas'ad, M. (2019) "Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat", *Sosiohumaniora*, 21(3), 349-354. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>

- Kusdiyanti, H., Zanky, M. N., P., L. F. and Wati, A. P. (2018) "Program Pengembangan Kewirausahaan Petani Selada Air Poncokusumo", *at-tamkin: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 45 - 56. doi: 10.33379/attamkin.v1i1.98.
- Novia, Yosania, Jamilullah, Elis Trisnawati, Euis Intan Anovani, Khidayatul Munawwaroh, & Firdaus. (2021). Social Return On Investment (SROI) Program for Empowering Pepper Farmers in Petaling Banjar Village. *Community Development Journal*, 5(3), 293-299. <https://doi.org/10.33086/cdj.v5i3.2473>
- Nurhayati. (2021). The Empowerment Of Housewives Through The Development Of Various Processed Bananas In The Murung Raya Sub-District: Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pengembangan Berbagai Olahan Pisang Di Kelurahan Murung Raya. *Community Development Journal*, 5(3), 288-292. <https://doi.org/10.33086/cdj.v5i3.2256>
- Permendesa PDPT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Sinollah, S. (2019) "Tatakelola Wilayah Sumber Mata Air Tirta Arum, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang", *Community Development Journal*, 3(2), pp. 71-81. doi: 10.33086/cdj.v3i2.1069.
- Sriwahyuningsih, A. dan Putra, C. P. (2018) "Pencatatan Angka Meter Air Di Water Treatment Plant (WTP) Grand Cikarang City Berbasis QR Code Melalui Smartphone", *Jurnal Informatika SIMANTIK*, 3(1), hlm. 28-32. Tersedia pada: <http://www.ejurnal.stmikcikarang.ac.id/index.php/Simantik/article/view/42> (Diakses: 28Januari2021).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Marala, R., Wibowo, H., & Kurniawan, R. (2019) "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Membangun Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Masalima)". *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), pp. 107-134. doi:<https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.90>.